



Puryanto¹
 Fani Ratny Pasaribu²
 Al-Aqsha³

IMPLEMENTASI TUGAS POKOK KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PP NO 73 TAHUN 2005 DI KELURAHAN OLO KOTA PADANG

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, Bagaimana Implementasi tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo Kota Padang dan untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam Implementasi tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo Kota Padang serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Implementasi tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo Kota Padang. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo Kota Padang belum sepenuhnya berjalan dengan baik ditandai adanya beberapa kendala yang ditemukan di Kelurahan Olo, dalam menjalankan tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Olo sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala sumber daya manusia berupa kekurangan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan kader-kader yang sering pergi ke Kelurahan.

Kata Kunci : Kelurahan, Implementasi, Tugas Pokok, Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Abstract

The purpose of this research is to find out how the main duties of the Head of the Governance Section are implemented based on PP No. 73 of 2005 in Olo Village, Padang City and to find out what obstacles occur in implementing the main duties of the Head of the Governance Section based on PP No. 73 of 2005 in Olo Village, Padang City and to find out what efforts have been made to overcome obstacles in implementing the main duties of the Head of Governance Section based on PP No. 73 of 2005 in Olo Village, Padang City. The method used by researchers is qualitative research using data collection techniques, observation, interviews and documentation. Data sources come from primary data and secondary data. The results of the research show that the implementation of the main duties of the Head of the Governance Section based on PP No. 73 of 2005 in Olo Village, Padang City has not yet gone completely well, indicated by several obstacles found in Olo Village. with specified procedures. Efforts have been made to overcome human resource constraints in the form of a shortage of employees in providing services to the community by involving cadres who often go to the sub-district.

Keywords: Village, Implementation, Main Duties, Head of Governance Section

^{1,2,3}Dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti, Indonesia.

email: puryantoyan@gmail.com faniratnypasaribu@unespadang.ac.id alaqsha0710@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut Paul C. Bartholomew dalam Wirman Syafri, (2012) menyatakan administrasi publik menurut pengertian ilmu politik mempunyai dua arti. Dalam arti luas, administrasi publik berarti pekerjaan yang terliput di dalam (yang dilakukan dalam rangka) penanganan yang aktual terhadap masalah-masalah pemerintahan, dalam arti sempit, administrasi publik berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang administrasi saja, yakni kegiatan kepala Eksekutif (kepala negara) dan para pejabat pembantuannya yang disebut Administrator. Sehubungan dengan hal tersebut Ekawati dalam Taufik dan Isril (2013) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat(swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Kelurahan merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Kelurahan merupakan suatu pemerintah yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan kelurahan memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak rakyat setempat. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Kelurahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Menurut ketentuan Undang-Undang tersebut, Kelurahan di beri pengertian sebagai; “Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Daerah-daerah di Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri yang disebut Otonomi daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Manajemen berasal dari kata manage (bahasa latinnya: manus) yang berarti: memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing.

Menurut George R. Terry, dalam (Fani Ratny, 2019) mendefenisikan manajemen sebagai, “...sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.” Menurut Herbert A. Simon, Donald W. Smithurg dalam Wirman Syafri (2012) Administrasi Publik adalah aktivitas-aktivitas cabang eksekutif dari pemerintahan tingkat negara, negara bagian dan daerah, aktivitas badan dan komisi yang ditetapkan oleh kongres dan ketentuan perundang-undangan negara bagian, aktivitas perusahaan negara dan dinas-dinas tertentu lainnya yang bersifat khusus. Secara administratif Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Salah satu Kelurahan yang ada di Kota Padang adalah Kelurahan Olo di Kecamatan Padang Barat. Kelurahan pada hakikatnya wilayah kerja sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. George C. Edward III dalam Subarsono (2011) menyarankan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi Anda. Komunikasi (communication), sumberdaya (resource), pembuangan (disposal), struktur birokrasi (birokrasi structure). Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas, seperti:

1. Communication (Komunikasi)

Menurut Edward III adalah komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Berdasarkan pengertian tersebut, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila parapembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Menurut Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- a. Transmisi: Aspek komunikasi mensyaratkan agar kebijakan publik dikomunikasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada khalayak kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Kejelasan: Dimensi kejelasan mensyaratkan kebijakan dikomunikasikan secara jelas kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran kepada setiap orang tentang apa tujuan, sasaran dan isi kebijakan publik serta apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan untuk membuat suatu kebijakan. agar efektif dan efisien.
- c. Konsistensi: Dimensi koherensi diperlukan agar tindakan yang diambil tidak membingungkan pelaksanaan tindakan, kelompok sasaran dan pemangku kepentingan.

2. Resources (Sumber Daya)

Menurut Edward III, salah satu sumber daya yang tersedia adalah sumber yang dapat menentukan keberhasilan implementasi Anda. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi dan sumber daya adalah keberhasilan proses implementasi dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya manusia, biaya dan waktu. Menurut Edward III, indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan adalah:

- a. Staf: Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
- b. Informasi: Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang: Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas: Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Dispositions (Disposisi)

Menurut Edward III. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mereka terhadap implementasi. Agar suatu implementasi menjadi efektif, seorang pelaksana tidak hanya perlu memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan jika kualitas kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau karakteristik aktor pelaksana. Berhasil atau tidaknya kebijakan dapat dibaca dari disposisi (milik badan eksekutif).

4. Bureaucracy (Birokrasi)

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Struktur Birokrasi menurut Edwards dalam Budi Winarno (2008) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Meskipun kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Upaya pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di kelurahan merupakan bagian penting yang harus di upayakan oleh pemerintah kelurahan yang tertuang dalam visi dan misinya. Dalam laporan evaluasi kinerja Kepala Seksi Tata

Pemerintahan Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat selama tahun 2021 bisa dilihat datanya dibawah ini.

Tercatat laporan kematian di Kelurahan Olo Bulan Januari 5 orang, Bulan Februari 2 orang, Bulan Maret 14 orang, Bulan April 7 orang, Bulan Mei 1 orang, Bulan Juni 13 orang, Bulan Juli 5 orang, Bulan Agustus 8 orang, Bulan September 5 orang. Jadi total keseluruhan warga Kelurahan Olo yang mengurus laporan kematian berjumlah 60 orang. Sementara itu laporan data E-Kelurahan di kelurahan olo Bulan Januari 429 orang, Bulan Februari 67 orang, Bulan Maret 109 orang, Bulan April 173 orang, Bulan Mei 22 orang, Bulan Juni 53 orang, Bulan Juli 42 orang, Bulan Agustus 62 orang, Bulan September 60 orang, Bulan Oktober 29 orang. Jadi total keseluruhan warga Kelurahan Olo yang mengurus laporan kematian berjumlah 1046 orang.

Namun dalam menjalankan tugas pokok seksi tata pemerintahan masih banyak ditemukan masalah seperti pelayanan, penampungan dan penyaluran aspirasi kepada masyarakat yang belum berjalan maksimal di kelurahan olo. Masyarakat belum bisa menyampaikan ide dan harapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian / kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan Kasi Tata Pemerintahan permasalahan muncul karena kurangnya sarana dan prasarana peralatan yang mendukung percepatan pelayanan seperti komputer dan printer yang masih terbatas jumlahnya, dan di Kelurahan Olo memiliki Pegawai yang sedikit sehingga masih belum maksimal pelayanan kepada masyarakat di kelurahan olo, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian. Karena dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kematian di Kelurahan Olo sudah bisa membuatnya secara online di android masing-masing. Selain karena pengaruh sarana dan prasarana, faktor sumber daya manusia juga turut mempengaruhi, karena sumber daya manusia sangat berperan penting dalam memberikan pelayanan, jika sumber daya manusia tidak berkompeten maka pelayanan di suatu instansi tidak akan berkualitas. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 Di Kelurahan Olo Kota Padang”

METODE

Menurut Agus Salim Manguluang (2016), Metodologi penelitian mencakup pengetahuan memeriksa aturan metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif, metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survey perpustakaan, survey lapangan, dan tugas pokok peningkatan kualitas integritas masyarakat di Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat serta menjelaskan fungsinya. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan aparat kelurahan Olo, seluruh pemuda yang ada di Kelurahan Olo, dan seluruh masyarakat Kelurahan Olo Kecamatan Padang barat. Menurut Sugiyono, (2016) metode penentuan sampel jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah keseluruhan aparat kelurahan olo dan masyarakat yang berjumlah 7 orang . Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, informasi dan bukti pendukung di lapangan untuk kepentingan penelitian adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 Di Kelurahan Olo Kota Padang

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin

lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan. Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo Kota Padang belum begitu memuaskan bagi masyarakat yang mengunjungi karena masih banyaknya kekurangan pada sistem pelayanan di Kelurahan Olo, baik pada sistem pelayanan yang masih kurang atau masyarakat yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Hal itu dapat peneliti temui pada wawancara dengan Bapak Aidil Putra, S.AP., M.M. Selaku KasiTata Pemerintahan Kelurahan Olo, Beliau mengatakan bahwa :

“Proses Pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo Kota Padang yaitu pelaksanaan Administrasi Kependudukan, Jadi Kasi Tata Pemerintahan memfasilitasi warga dalam mengurus Administrasi Kependudukan seperti membuat Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan membuat rencana dan program kerja seksi, Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang menghambat seperti warga yang tidak memenuhi syarat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan masih kurangnya sarana dan prasarana seperti perangkat komputer untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Olo,”

Dalam Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 Kepala Seksi Tata Pemerintahan memiliki beberapa tugas pokok yaitu pelaksanaan Administrasi Kependudukan, Jadi Kasi Tata Pemerintahan memfasilitasi warga dalam mengurus Administrasi Kependudukan seperti membuat Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan membuat rencana dan program kerja seksi. Dalam penelitian ini, Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo Kota Padang belum sepenuhnya berjalan dengan baik di mana hal itu dapat kita lihat dari berbagai faktor yang sesuai dengan teori peneliti yaitu George C Edward III yang menjelaskansebagai berikut :

1. Komunikasi (*Communication*)

Pada komunikasi terdapat keberhasilan implementasi sebuah kebijakan masyarakat agar implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target). Sebagaimana peneliti temui pada saat wawancara dengan Bapak Zamril S.Sos selaku Lurah Olo Kecamatan Padang Barat, Beliau mengatakan bahwa :

“Kalau saya lihat dari segi komunikasi Aidil ini sebagai Kasi Tata Pemerintahan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat misalnya ada informasi terbaru dia langsung mengabarkan nya kepada warga dan Aidil ini ramah dan fast respon dalam memberikan pelayanan kepada warga yang berurusan ke kantor lurah “.

Menurut Edward III pelaksanaan komunikasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi

- a. Transmisi: Aspek komunikasi mensyaratkan agar kebijakan publik dikomunikasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada khalayak kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Kejelasan: Dimensi kejelasan mensyaratkan kebijakan dikomunikasikan secara jelas kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran kepada setiap orang tentang apa tujuan, sasaran dan isi kebijakan publik serta apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan untuk membuat suatu kebijakan agar efektif dan efisien.
- c. Konsistensi: Dimensi koherensi diperlukan agar tindakan yang diambil tidak membingungkan pelaksanaan tindakan, kelompok sasaran dan pemangku kepentingan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang harus ada didalam mengimplementasikan suatu kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan konsistennya suatu

ketentuan atau aturan suatu kebijakan, jika para aktornya yang bertanggungjawab akan hal mengimplementasikan kebijakan kurang efektif dalam melakukan pekerjaannya, maka sudah dapat dipastikan jika implementasi kebijakannya pun akan kurang efektif. Untuk melihat seberapa baik sumber daya yang dimiliki oleh Kelurahan Olo beserta petugas lapangan yang dimilikinya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zamril S.Sos. Selaku Lurah Kelurahan Olo, Beliau mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah sebagai atasan untuk SDM di Kelurahan Olo cukup bagus untuk kedepannya, Karena semua urusan kegiatan yang berhubungan dengan Masyarakat dan Pemerintahan bisa tercover tugas ini selama saya memerhatikanya”

Dari wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia Kelurahan Olo sudah cukup baik untuk kedepannya ditandai dengan tercovernya semua urusan kegiatan yang berhubungan dengan Masyarakat dan Pemerintahan, namun saat melakukan observasi peneliti masih menemukan beberapa kendala seperti kurangnya pegawai yang melayani masyarakat sehingga terhambatnya pelayanan yang dilakukan di Kelurahan Olo.

b. Sarana dan Prasarana

Luas wilayah dan infrastruktur yang dimiliki oleh kantor Kelurahan Olo sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok. Oleh karena itu, memiliki sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak bagi kantor Kelurahan Olo untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Olo

No	Uraian Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin		
A	<i>Alat-alat Bengkel</i>		
1	Mesin potong rumput	1 Unit	Baik
B	<i>Alat-alat Angkutan/Kendaraan Roda 3</i>		
1	Becak motor Suzuki Thunder	1 Unit	Kurang Baik
C	<i>Peralatan Kantor</i>		
1	Filling Kabinet	1 Unit	Baik
2	Lemari Arsip	1 Unit	Baik
3	Kipas Angin	2 Unit	Baik
D	<i>Perlengkapan Kantor</i>		
1	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	1 Buah	Baik
2	Gambar Walikota dan Wakil Walikota	1 Buah	Baik
3	Papan Informasi	1 Buah	Baik
E	<i>Peralatan Komputer</i>		
1	Seperangkat Komputer	2 Unit	Baik
2	Printer	2 Unit	Baik
3	PC	3 Unit	Baik
F	<i>Meubelair</i>		
1	Kursi Kasubag	2 Unit	Baik
2	Kursi Staf	4 Unit	Baik
3	Meja	1 Unit	Baik
4	Meja ½ Biro	1 Unit	Baik
5	Meja Kerja ½ Biro	1 Unit	Baik
6	Meja Kerja ½ Biro Staf	4 Unit	Baik
7	Meja Kerja ½ Kasubag	1 Unit	Baik
8	Kursi	10 Unit	Baik

Sumber : *Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Olo Tahun 2023*

Dari rincian Sarana dan Prasarana diatas masih terdapat beberapa keterbatasan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kelurahan Olo seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan pelayanan bagi Masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mereka terhadap implementasi. Agar suatu implementasi menjadi efektif, seorang pelaksana tidak hanya perlu memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan jika kualitas kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau karakteristik aktor pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Struktur Birokrasi menurut Edwards dalam Budi Winarno (2008) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi.

Kendala Apa Saja Dalam Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 Di Kelurahan Olo Kota Padang

Ketika memecahkan masalah sosial, pasti akan ada kendala untuk realisasinya. Itu tergantung pada apakah kendalanya besar atau kecil dan mudah diatasi. Namun, jika program tersebut dijalankan dengan baik dan mampu membangkitkan semangat masyarakat, maka kendala yang dihadapi tidaklah besar atau sulit. Adapun permasalahan yang teridentifikasi saat peneliti melakukan observasi dan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga pelayanan dalam menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum belum maksimal;
2. Kelurahan yang mengalami kekurangan staf atau pegawai yang terlatih untuk mengelola dan menjalankan berbagai program dan kegiatan. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan Kelurahan;
3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat, Kepala seksi tata pemerintahan Kelurahan Olo mungkin menghadapi tantangan dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan program pemerintah. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dan membatasi pemahaman yang holistik tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Adapun kendala dalam Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 Di Kelurahan Olo yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Komunikasi

Dikarenakan Kelurahan olo berada di pesisir pantai membuat latar belakang pendidikan Masyarakat berbeda beda dan itu membuat terjadinya kendala dalam melaksanakan Sosialisasi. Hal itu disampaikan Bapak Zamril S.Sos selaku Lurah Kelurahan Olo, Beliau mengatakan bahwa:

“Warga yang berurusan ke Kelurahan Olo latar Pendidikannya berbeda beda apa lagi kita berada di daerah pesisir pantai jadi untuk menerangkan untuk warga yang berurusan kadang sekali sampai dua kali kita terangkan tidak mengerti masalahnya itu, Menyampaikan informasi ke warga susah dikarenakan daya tangkap warga di karenakan latar belakang pendidikan membuat kita sulit”

Dikarenakan latar belakang pendidikan Masyarakat Kelurahan Olo yang berbeda beda membuat Warga kurang dalam menyerap informasi yang diberikan oleh Pegawai Kelurahan Olo. Hal itu disampaikan oleh Bapak Benni Ardi selaku Masyarakat Kelurahan Olo, Beliau mengatakan bahwa :

“Ada disinformasi atau informasi yang tidak terlalu jelas mereka terima contohnya berita yang didapat oleh Masyarakat tidak dikonfirmasi terlebih dahulu namun mereka sudah memiliki

pendapat sendiri, Pendapat sendiri ini yang langsung dijadikan sebagai bentuk hal yang sudah diketahui tadi”

Dari dua hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala dalam Komunikasi terhadap Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan terdapat pada saat memberikan informasi dalam bentuk sosialisasi dikarenakan letak Kelurahan Olo berada di pesisir pantai membuat latar belakang pendidikan Masyarakat berbeda beda, Sehingga pada saat memberikan informasi masyarakat tidak memahami informasi yang diberikan, oleh karena itu terjadinya disinformasi.

2. Kendala Sumber Daya

a. Kendala Sumber Daya Manusia

Kendala Sumber Daya Manusia menjadi masalah bagi Masyarakat dan Kantor Kelurahan Olo, Kurangnya tenaga kerja jika jumlah pekerja yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan, maka akan terjadi beban kerja yang berlebihan pada pekerja yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, peningkatan tingkat kesalahan, dan meningkatkan risiko kelelahan atau burnout. Hal ini Peneliti temukan pada saat melakukan wawancara dengan Bapak Aidil Putra, S.AP., M.M selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Olo beliau mengatakan bahwa :

“Kendala Sumber Daya Manusia di Kelurahan ini jumlah Pegawainya yang sedikit yang ada di Kelurahan ini hanya 3 orang, 1 Lurah dan 2 Kepala Seksi jadi kalau di rasio di Negara maju jumlah Penduduk dengan jumlah Pegawai dilayani ada rasionya, Sekarang di Kelurahan Olo ini jumlah Penduduknya 4312 jiwa, Seharusnya yang melayani sekitar 10 orang Pegawai secara normalnya sesuai rasion Kependudukan namun kenyataan yang ada hanya 3 orang Pegawai dan itu kendalanya pegawai yang terlalu sedikit”

Jumlah SDM yang tepat bukan hanya tentang jumlah yang cukup, tetapi juga tentang kecocokan kualifikasi, keterampilan, dan budaya organisasi. Mengelola jumlah SDM yang baik adalah faktor penting dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Dari hasil kedua wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala Sumber Daya Manusia di Kelurahan Olo karena kekurangan Pegawai, Tidak berimbang rasio jumlah Pegawai yang hanya berjumlah 3 orang dengan Penduduk yang berjumlah 4312 jiwa membuat urusan kependudukan dan pelayanan umum terhambat.

b. Kendala Sarana dan Prasarana

Selain dari Sumber Daya Manusia, Kelurahan Olo juga mengalami kendala sarana dan prasarana, Dimana sarana dan prasarana ini belum memadai yang mengakibatkan layanan kependudukan dan pelayanan umum belum maksimal, Hal ini ditemukan pada saat wawancara bersama Bapak Aidil Putra S.AP., M.M Selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Olo, Beliau mengatakan bahwa :

”Kendala yang kami rasakan saat ini kurangnya sarana dan prasarana seperti Komputer sekarang Komputer Kelurahan cuman 1 apabila ada warga banyak berurusan kami tidak bisa melayani secara prima karena Komputer cuma 1 jadi agak lambat pelayanan, Jika Komputer lebih dari 1 mungkin Kasi yang lain bisa membantu”

Sarana dan prasarana merupakan dua komponen yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dalam konteks individu, organisasi, atau masyarakat, sarana dan prasarana memiliki peran yang signifikan.

3. Kendala Disposisi

Kendala dari disposisi dapat dilihat dari tatacara pelaksanaan sejauh mana keberhasilan dari pelaksana sesuai dengan peraturan dan bagaimana komitmen dari para Pegawai di Kelurahan Olo dalam menjalankan Peraturan tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak Aidil Pura S.AP, M.M selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Olo, Beliau mengatakan bahwa :

“Kita masing-masing Kasi ini ada tugas pokoknya misalnya saya sebagai Kasi Tata Pemerintahan punya program kita membuat pelayanan Kartu Identitas Anak sudah kami share ke RT tentang syarat syaratnya kadang Masyarakat komplek karena informasi nya tidak sampai sedangkan RT yang lain sampai, Kami ada targetnya untuk Kecamatan Barat ini harus 5000

keping tahun ini jika bermasalah itu dikarenakan RT yang tidak menyampaikan ke warga dan itu yang membuat program kami tidak memenuhi target”

Disposisi merupakan suatu hal yang penting dalam berbagai konteks, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, maupun organisasi. Efektivitas dan efisiensi: dengan memiliki disposisi yang baik, seseorang dapat mengelola tugas dan tanggung jawab dengan lebih efektif dan efisien. Disposisi yang baik akan membantu seseorang dalam mengatur prioritas, mengambil keputusan yang tepat, dan mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya yang ada.

4. Kendala Struktur Birokrasi

Salah satu aspek struktural penting dari setiap Organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan seluruh pegawai Kelurahan dalam pelaksanaan kependudukan dan pelayanan umum di Kelurahan Olo ini agar dapat dengan baik dan tidak berbuat semena-mena di lapangan dalam bertindak. Terkadang terjadi masalah dalam pelaksanaan tugas pegawai dimana Belum maksimalnya sinergisitas dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan pelayanan umum antara pemerintah, swasta dan masyarakat, yang menimbulkan masalah yang tidak baik bagi organisasi. Hal ini peneliti temui setelah melakukan wawancara dengan Bapak Aidil Putra, S,AP., M.M, Selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Olo, Beliau mengatakan bahwa:

“Kendala struktur birokrasi SOP seperti mengurus surat nikah kita bikin SOP nya 2 hari kendalanya di lapangan kurangnya persyaratan yang diberikan warga seperti kurang fotonya dan surat pernyataan belum menikah diketahui RT/RW kadang RT/RW nya susah dicari sehingga molor waktunya sampai seminggu”

Struktur birokrasi memiliki kepentingan yang signifikan dalam organisasi dan pemerintahan. Efisiensi operasional struktur birokrasi membantu mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci. Dalam sebuah organisasi yang kompleks, struktur birokrasi yang baik memungkinkan pembagian kerja yang efisien dan jelas, menghindari tumpang tindih atau perdebatan mengenai tanggung jawab.

Upaya Apa Saja Dalam Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 Di Kelurahan Olo Kota Padang

Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintah Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo menghadapi berbagai macam kendala untuk itu diperlukan upaya untuk yang tepat untuk mengatasi berbagai macam kendala tersebut diantaranya upaya melengkapi dan memaksimalkan sarana dan prasarana serta melengkapi kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang profesional dibidangnya. Untuk mengetahui lebih lanjut upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah pada proses menjalankan Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintah Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo sebagai berikut :

1. Upaya Komunikasi

Upaya komunikasi mencakup langkah-langkah yang diambil untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara individu, kelompok, atau organisasi. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai metode, teknik, dan strategi untuk memastikan pesan disampaikan dengan jelas, dipahami dengan baik, dan diterima oleh penerima komunikasi. Upaya komunikasi dapat meliputi:

1. Penentuan tujuan komunikasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik.
2. Penyusunan pesan yang padat, jelas, dan relevan dengan audiens yang dituju.
3. Pemilihan media komunikasi yang sesuai, seperti pertemuan tatap muka, email, telepon, atau media sosial.
4. Pemilihan bahasa dan gaya komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penerima pesan.
5. Menggunakan teknik mendengarkan aktif untuk memahami sudut pandang dan kebutuhan penerima komunikasi.

6. Memberikan umpan balik secara teratur untuk memastikan pemahaman yang saling berarti antara pihak yang berkomunikasi.
7. Mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin muncul, seperti perbedaan budaya, bahasa, atau persepsi.

2. Upaya Sumber Daya

Upaya sumber daya mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mengelola, mengalokasikan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Ini mencakup upaya untuk mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, mengumpulkan sumber daya yang relevan, dan mengoptimalkan penggunaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Upaya sumber daya melibatkan perencanaan yang cermat, pengaturan prioritas, pengawasan, dan pengaturan alokasi sumber daya yang tepat guna untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan dalam konteks yang terbatas. Dalam Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintah Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo masih terdapat kendala terutama dalam bidang Sumber Daya Manusia. Jumlah pegawai yang sedikit dalam melayani Masyarakat yang banyak membuat pelayanan di Kelurahan Olo terhambat. Oleh karena itu ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Hal ini Peneliti temukan ketika melakukan wawancara bersama Bapak Zamril S.Sos. Selaku Lurah Kelurahan Olo, Beliau mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan yaitu kami libatkanlah kader-kader yang sering pergi ke Kelurahan untuk membantu para pegawai di kelurahan dan mereka itu sifatnya sukarela dan tidak bayar, misalnya saat waktu Covid ada kegiatan Vaksin dan pembagian bantuan sosial yang memerlukan pegawai untuk melayani warga yang banyak jadi kami libatkan lah kader-kader ini untuk membantu”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya dari kendala sumber daya manusia berupa kekurangan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan melibatkan kader-kader yang sering pergi ke Kelurahan untuk membantu pekerjaan para Pegawai di Kelurahan Olo dengan sukarela dan tidak dibayar.

3. Upaya Disposisi

Upaya disposisi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah atau situasi. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan tindakan yang relevan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Upaya disposisi dapat mencakup strategi, kebijakan, atau langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan Untuk itu diperlukan upaya dalam mengatasi kendala ini. Hal ini peneliti temukan dalam wawancara bersama Bapak Aidil Putra, S,AP,. M.M, Selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Olo, Beliau mengatakan bahwa:

“Kita terus melakukan sosialisasi disetiap rapat RT/RW dengan memberitahu warga untuk memanfaatkan program gratis yaitu Kartu Identitas Anak, Kami fasilitasi untuk mengurus Kartu Identitas Anak nya dengan membawa data data dan persyaratannya. Jadi kemaren ada kegiatan atau kunjungan sehari bersama Walikota Padang disitu kami juga menyelipkan informasi tentang program Kartu Identitas Anak, Jadi kami yang Proaktif”

Upaya disposisi dalam kelurahan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kelurahan untuk mengatasi berbagai persoalan atau kebutuhan yang ada di lingkungan tersebut. Disposisi berarti tindakan untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu masalah. Dari hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa Kelurahan Olo telah melakukan upaya penyelesaian masalah dari kendala disposisi dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat saat rapat atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat tentang pemanfaatan program yang sedang dijalankan yaitu Kartu Identitas Anak.

4. Upaya Struktur Birokrasi

Upaya struktur birokrasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki, mengubah, atau mengoptimalkan organisasi dan sistem kerja dalam birokrasi. Upaya struktur birokrasi melibatkan analisis dan evaluasi terhadap berbagai aspek, termasuk hierarki organisasi, aliran komunikasi dan informasi, prosedur administratif, pengambilan keputusan,

penggunaan teknologi, pengelolaan sumber daya manusia, serta hubungan antara lembaga birokrasi dengan pihak eksternal. Hal ini peneliti temukan dalam wawancara bersama Bapak Aidil Putra, S,AP., M.M, Selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Olo, Beliau mengatakan bahwa :

“Upaya yang kami lakukan jika warga susah mencari RT/RW kami hubungi RT/RW tersebut supaya Surat Nikah itu cepat selesai sesuai SOP yang telah ditentukan, Kadang warga yang menikah ini ada diluar Kota atau sibuk karena bekerja maka dari itu kami fasilitasi untuk menghubungi RT/RW tersebut”

Upaya struktur birokrasi dalam kelurahan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. dari hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa Kelurahan Olo telah melakukan upaya penyelesaian masalah dari kendala struktur birokrasi dengan membantu Masyarakat dalam menghubungi RT/RW untuk mengurus Surat Nikah agar pengurusan surat selesai dengan cepat sesuai SOP yang ditentukan.

SIMPULAN

1. Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo belum sepenuhnya berjalan dengan baik ditandai dengan adanya beberapa kendala yang ditemukan di Kelurahan Olo, dalam menjalankan tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Olo sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan ditandai dengan memberikan fasilitas kepada Masyarakat dalam pengurusan kependudukan dan pelayanan umum.
2. Kendala yang terjadi dalam Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo yaitu berupa :
 - a. Kendala komunikasi yang terletak pada latar belakang pendidikan Masyarakat Kelurahan Olo yang berbeda beda membuat warga kurang dalam menyerap informasi yang diberikan saat sosialisasi oleh Pegawai Kelurahan Olo.
 - b. Kendala sumber daya manusia terletak pada kekurangan Pegawai, tidak berimbangnya rasio jumlah pegawai dan jumlah penduduk.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kendala yang terjadi dalam Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo yaitu :
 - a. Dalam bidang komunikasi dalam mengatasi kendala Masyarakat yang tidak memahami informasi kependudukan yang diberikan dalam bentuk Sosialisasi secara lisan.
 - b. Upaya dalam bidang sumber daya manusia berupa kekurangan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan melibatkan kader-kader yang sering pergi ke Kelurahan.

SARAN

1. Kelurahan Olo dapat melakukan rekrutmen yang efektif untuk menarik calon pegawai yang berkualitas. Gunakan platform online, jejaring sosial, atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mencari kandidat yang potensial serta berikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai yang ada untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini akan membantu mereka menjadi lebih produktif dan kompeten dalam pekerjaan mereka.
2. Kelurahan Olo dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan umum baik secara kuantitas maupun kualitas belum memadai dan belum tersedia sesuai standar Kelurahan, dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Identifikasi area di mana kekurangan paling dirasakan dan prioritaskan solusi berdasarkan urgensi. Agar pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.

3. Bagi pembaca, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pembaca terkait dengan Implementasi Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 di Kelurahan Olo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara., hlm. 40-50
- AG.Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta., hlm. 90-92.
- Agussalim Manguluang, 2016, Metodologi Penelitian, Padang, Ekasakti Press, hal 7.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta., hlm. 203.
- Fani Ratny Pasaribu. 2019. "Manajemen Istano Basa Pagaruyung", Jurnal Pariwisata, Vol. 6 No 1 April 2019, ISSN: 2355-6587, e-ISSN: 2528-2220, hal 71-79, Universitas Negeri Padang
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Rini aristin, Rina nur azizah. 2018. "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura". Madura: Universitas Madura., hlm. 123.
- Syafri Wirman, 2012, Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta : Erlangga., hlm. 23.
- Taufik dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 4. Nomor 2 (Oktober)., hlm.136
- Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah